

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk memiliki SAKIP yang merupakan suatu rangkaian sistematis yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban institusi atau organisasi melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta penggunaan anggarannya.

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
6. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 188.4.48/63/SET/05/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor : B.KEUDA/900.910/DPPA/82/2019 Tanggal 02 September 2019.

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah atas pencapaian perencanaan kinerja target Penetapan Kinerja Tahun 2019.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun selanjutnya.

C. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan didukung oleh 1 (Satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) sub bagian dan 4 (Empat) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang sebagai berikut :

1) Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas :

- Sub Bidang Bina Ideologi.
- Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

3) Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :

- Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.
- Sub Bidang Penanganan Konflik.

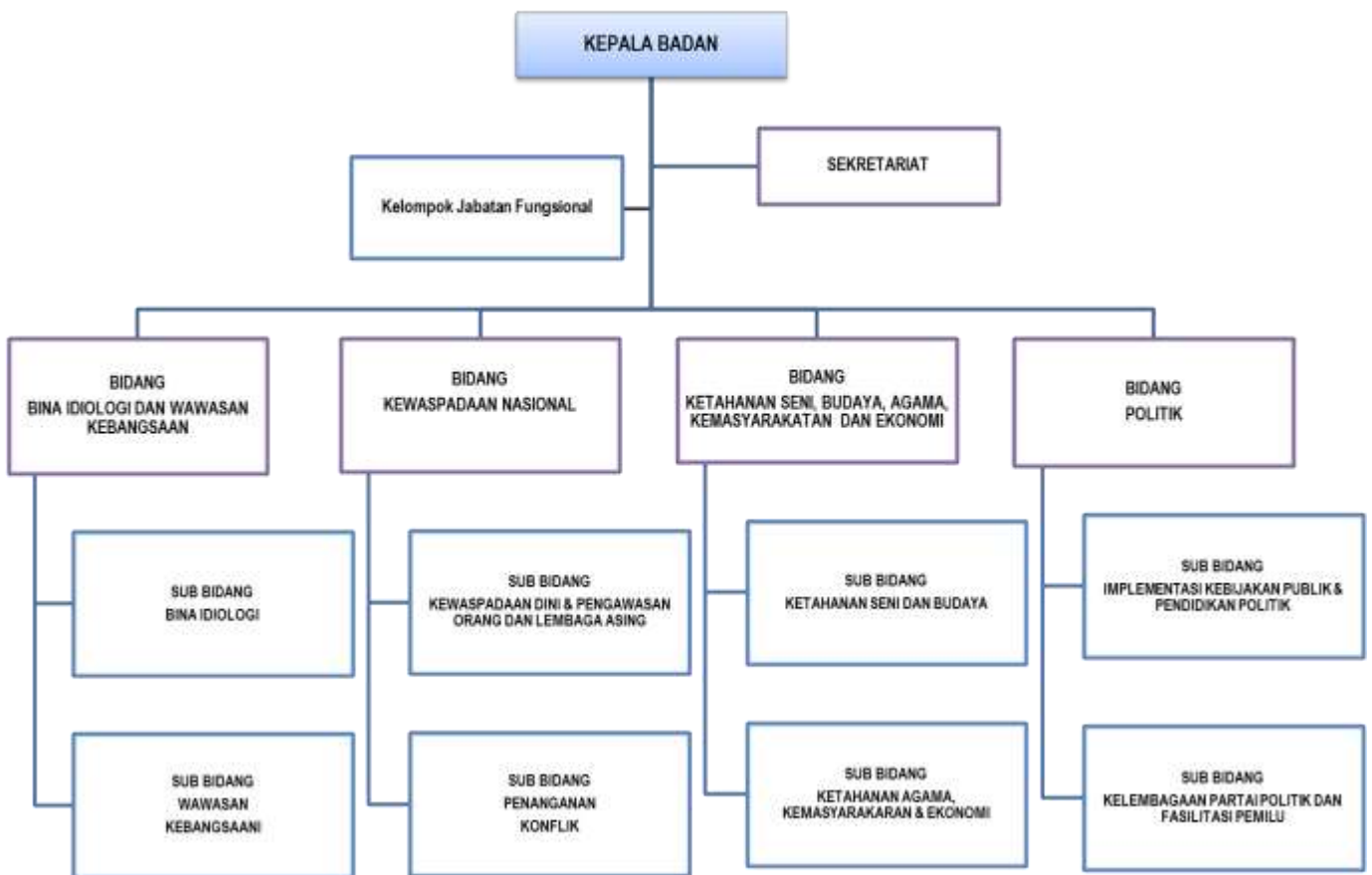
4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas :

- Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya.
- Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

5) Bidang Politik, terdiri atas :

- Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik.
- Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.

Bagan struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT



3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2019 sebanyak 45 orang, terdiri dari :

a. PNS sebanyak 45 orang dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1) Kepala Badan | : | 1 orang |
| 2) Sekretaris | : | 1 orang |
| 3) Kepala Bidang | : | 4 orang |
| 4) Kepala Sub Bagian | : | 2 orang |
| 5) Kepala Sub Bidang | : | 8 orang |
| 6) Fungsional arsiparis | : | 1 orang |
| 7) Staf pelaksana | : | 28 orang |

b. Pegawai tidak tetap/tenaga kontrak sebanyak 4 orang :

- 1) Operator komputer : 2 orang
- 2) Tenaga pengemudi : 1 orang
- 3) Tenaga kebersihan : 1 orang

4. Sarana dan Prasarana Kantor

Berikut disajikan sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kendaraan roda 4 : 2 buah
- 2) Tennis Meja : 1 buah
- 3) Papan Nama Kantor : 1 buah
- 4) Printer : 11 buah
- 5) Komputer PC/CPU : 11 buah
- 6) Meja Kerja : 73 buah
- 8) Handycam : 1 unit
- 9) LCD Proyektor : 2 unit
- 10) Wirrales : 1 unit
- 11) Sound System : 1 set
- 12) UPS Stabiliser : 17 buah
- 13) Router Modem Wifi : 3 unit
- 14) Tanah Bangunan : 4 bidang (pindah kantor)
- 16) Laptop : 3 unit
- 17) Kursi Tamu/ Sofa : 3 set
- 18) Kain Gorden : 39 lembar
- 19) Lemari Arsip 2 pintu : 8 buah
- 20) Berangkas Besi : 1 buah
- 21) Rumah Dinas : 3 unit
- 22) Kursi Rapat : 80 buah
- 23) Kulkas 1 pintu : 1 buah
- 24) Dispenser dan Galon : 2 buah

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang latar belakang tentang perlunya Renstra, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (Tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Capaian-capaian Renstra Periode sebelumnya berdasarkan standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Periode sebelumnya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan kedepan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan perumusan Program dan Kegiatan dan Pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESBANGPOL

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari RENSTRA Perangkat Daerah secara keseluruhan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1) RENCANA STRATEGIS BADAN KESBANGPOL PROVINSI NTT

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2019-2024 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi NTT dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik

1. VISI

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Berdasarkan pada Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai berikut : **“Terwujudnya Masyarakat NTT yang cerdas berdemokrasi dan berwawasan kebangsaan ”**.

Untuk memberikan pemahaman tentang maksud nilai-nilai dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut :

Masyarakat yang cerdas berdemokrasi, artinya bahwa melalui visi ini seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggungjawab sehingga tercipta pemerintahan yang terlegitimasi. Sedangkan masyarakat yang cerdas berwawasan kebangsaan, artinya melalui visi ini seluruh masyarakat NTT menerima dan menghargai keberagaman dan toleransi sesuai nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 untuk mendukung pencapaian Visi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.** Dengan demikian maka Misi Badan Kesbangpol ada 5 (lima) yaitu :

- 1) Membina ideologi dan meningkatkan wawasan kebangsaan;
- 2) Mewujudkan kewaspadaan Nasional dalam rangka mencegah ancaman radikalisme, terorisme dan konflik sosial;
- 3) Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- 4) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
- 5) Meningkatkan tata kelola dan efektifitas kelembagaan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Strategis Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2019

NO	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan serta Peningkatan kondisi keamanan pembangunan yang kondusif	<ul style="list-style-type: none">- Terwujudnya Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.- Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional.
2.	Pembangunan politik di daerah melalui sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.	<ul style="list-style-type: none">- Terwujudnya pembangunan politik dan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.- Terwujudnya Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik
3.	Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Terwujudnya Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

2) PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Pada Tahun 2019 Badan Kesbangpol memiliki 1 (satu) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kegiatan	Target Kinerja
1.	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Analisis Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Lomba Pidato antar Pelajar Tk. SMU se Provinsi NTT, Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila, Penguatan Kelembagaan Forum Pembaruan Kebangsaan, Sosialisasi wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan, Forum Deseminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Dialog Pengaruh Ideologi Pancasila Lintas Generasi, Sosialisai 4 Pilar Kebangsaan, Rakor Kesbangpol, Tersosialisasinya Informasi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Pembentukan dan Penguatan FKUB, FPK dan FKDM	Terlaksananya Rakor Rakor FKDM/FKUB/FPK Provinsi & Kab/Kota, Penguatan Kelembagaan, Rapat Bulanan FKDM, Raapat Bulanan FPK, rapat Bulanan FKUB
4.	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Melalui Forum Diskusi Hak Politik Perempuan, Terlaksananya Desk PEMILU Posko Pilpres dan Pileg, Terlaksananya Pemantauan dan Pendampingan Proses Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019, Terlaksananya Penyuluhan UU No 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU

No	Kegiatan	Target Kinerja
5.	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik, Terlaksananya Penilaian dan Pengkajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi.
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di 22 Kab/Kota
7.	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Tersosialisasinya UU No. 16 Tahun 2017 Ttg Ormas, Meningkatnya Ketahanan Seni dan Budaya, serta Ketahanan Ekonomi, Meningkatnya kerukunan serta terinventarisirnya persoalan dan kebutuhan terkait upaya penumbuhan kerukunan antar umat, Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Seni dan budaya antara provinsi dan Kab/Kota, Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi antara provinsi dan Kab/Kota, Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Ketahanan Agama antara provinsi dan Kab/Kota, Tersedianya Data Ormas dan LSM, Meningkatnya Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi di wilayah perbatasan
8.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	1) Terinventarisirnya masalah-masalah aktual serta solusinya, 2) Menurunnya gangguan konflik sosial Tersedianya Data Konflik sosial dan upaya pemecahannya, 3) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial, 4) Tersedianya SDM Community Policing, 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme, 6) Terwujudnya pemahaman tentang Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

		Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
No	Kegiatan	Target Kinerja
9.	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	Terwujudnya kerjasama penanganan Orang Asing dan Lembaga asing, Terwujudnya rasa nyaman bagi orang asing dan lembaga asing berada di NTT
10.	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Bersinerginya program/kegiatan dalam pencegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES

3) RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel. 2.2

**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTT 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan Wawasan Politik Kebangsaan.	1. Persentase Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.	60
2	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik	2. Jumlah Partai Politik berdasarkan dokumen penilaian dan hasil kajian bantuan keuangan Parpol 2019-2024.	10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.	3. Jumlah ormas atau kelompok masyarakat di Provinsi NTT yang dibina melalui fasilitasi kebijakan peraturan perundang-undangan.	5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2019 merupakan tolak ukur keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2019, sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama :	Terwujudnya Pembinaan Wawasan Politik Kebangsaan
------------------------------------	---

Dalam mendukung pencapaian Strategis tersebut pada Tahun 2019 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program **Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Peningkatan Wawasan Kebangsaan

a. Lomba Pidato Empat Konsensus Nasional Bagi Pelajar SLTA Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

Terlaksananya Kegiatan Lomba Pidato pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2019, bertempat di Hotel Naka Jalan Frans Seda 21 Kupang-Nusa Tenggara Timur. Peserta yang hadir dari 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten TTU, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata dan Sumba Timur dan masing-masing Kabupaten terdiri dari 1 orang pelajar SMA, 1 orang guru pendamping, 1 orang Badan Kesbangpol Kabupaten. Thema Lomba adalah “ Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju dan Berkarakter Nasional”. Hasilnya adalah 1). Pelajar SMA sebagai generasi muda memahami nilai-nilai kebangsaan sehingga dalam kehidupannya dapat mewujudkan bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. 2). Dengan pengamalan nilai - nilai Empat Konsensus Nasional, maka para pelajar SLTA sebagai generasi millennial harapan

bangsa dapat menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme dan patriotisme, selalu mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan serta keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Ditetapkan juara Lomba Pidato Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

No	Kriteria Juara	Nama/ Asal SMA	Kabupaten	Total Nilai
1	Juara I	Swesti Lesgi S. Taga/ PGRI WINIRAI	Sabu Raijua	86.33
2	Juara II	Kristina E. U.Lajar/ SMA Frater Don Bosco Lewoleba	Lembata	83,33
3	Juara III	Archangela Z. Hardin/ SMA I Kefamenanu	TTU	82,17
4	Juara harapan I	Aurelia Claudia Riasti/ SMAN 1 RINDI Umalulu	Sumba Timur	81.33
5	Juara harapan II	Cornelia L. T. Boro	Sumba Barat	81.11
6	Juara harapan III	Anastasia Jeni Ngara/ SMA Negeri I Kodi SBD	Sumba Barat Daya	81.03

b. Dialog Interaktif Radio dan TVRI Lokal.

- Terlaksananya Dialog di TVRI Kupang pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan Narasumber Gubernur NTT.
- Terlaksananya Dialog di RRI Kupang pada tanggal 26 September 2019, dengan Narasumber Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
- Terlaksananya Dialog TVRI Kupang pada tanggal 6 Desember 2019, dengan Narasumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Thema dialog adalah Menjaga Nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong Menuju Indonesia Maju.

Hasilnya adalah terlaksananya dialog dalam upaya menjaga nilai integritas, etos kerja dan gotong royong menuju Indonesia maju yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat NTT sebagai warga Negara Indonesia, sekaligus upaya menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai tersebut sejak dini bagi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

c. Sosialisasi wawasan kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara.

- Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, bertempat di Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur.
- Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, bertempat di Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

Peserta sosialisasi masing-masing berjumlah 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari generasi milenial / generasi muda (Pelajar : 9 orang, Tokoh Muda Agama/ Pemuda/i Gereja : 15 orang, Tokoh Pemuda/i : 36 orang), Guru : 5 orang, dan Instansi terkait lingkup Pemerintah Kecamatan: 5 orang.

Hasilnya adalah : 1). Peserta dapat memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Empat Konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD' 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Meningkatnya rasa nasionalisme serta patriotisme peserta. 3). Pernyataan sikap kebangsaan Sejuta Cinta Generasi Milenial dari perbatasan antar Negara.

d. Kegiatan Forum komunikasi Revitalisasi Pancasila.

Terlaksananya kegiatan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 di Ende Kabupaten Ende. Peserta berjumlah 90 orang yang terdiri dari Aparat Badan Kesbangpol Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus partai politik, Ormas, LSM, mahasiswa dan Pelajar di Kabupaten Ende, dengan hasil kegiatan adalah Adanya komitmen Peserta dengan rekomendasi sebagai berikut:

Penguatan kapasitas masyarakat melalui penanaman nilai-nilai luhur Pancasila sebagai idiologi negara, yang dimulai dari keluarga.

- Pemerintah perlu membangun Rumah Pancasila dalam memperkuat literasi Pancasila.
- Rencana Aksi Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dimulai dari Pendidikan dalam dan luar sekolah, Ormas/NGO di setiap wilayah Provinsi NTT.
- Mengumandangkan lagu Indonesia Raya dua kali sehari di tempat umum dan tempat aktifitas lainnya (Telah dikeluarkan Surat Gubernur NTT Nomor: BU.003/126/KESBANGPOL/2019, tanggal 17 Mei 2019, kepada Para Bupati se NTT, Walikota Kupang serta kepada seluruh Pimpinan OPD/ Instansi

vertical/ BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/ Pimpinan Organisasi Lingkup Provinsi NTT)

- Peringatan HUT RI dimeriahkan sampai ke tingkat Dusun.

e. Kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat.

- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, pada tanggal 11 Pebruari 2019.
- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Alor, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019.
- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Manggarai Barat pada pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2019.

Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 70 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten. Hasil kegiatan adalah : 1). Adanya pemahaman Peserta tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Adanya pemahaman yang sama bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan karenanya tidak ada ideologi lain selain Pancasila. 3). Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, merekomendasikan siap untuk menjadi “Laboratorium Wawasan Kebangsaan untuk Indonesia”, sehubungan dengan keteguhan masyarakat Manggarai Barat pada nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

f. Dialog pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila lintas generasi.

Terlaksananya Dialog tersebut di Ende Kabupaten Ende pada hari Selasa tanggal 19 November 2019. Peserta berjumlah 70 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten . Hasil kegiatan adalah 1) Peserta dapat memahami pentingnya Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Peserta dapat memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagai panduan kehidupan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. 3) Meningkatnya rasa nasionalisme dan patriotisme generasi

millenial untuk berpartisipasi aktif menjaga negeri ini dari upaya-upaya menggantikan ideologi pancasila dengan ideologi lain.

g. Kegiatan: Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM

1) Penguatan Kelembagaan FKUB.

- Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan I, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB, dengan agenda : Persiapan Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Ende. Peserta dihadiri oleh 24 orang. Hasilnya adalah adanya konsep/skenario rapat koordinasi.
- Terselenggaranya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan II, pada tanggal 15 Juni 2019, dihadiri oleh 18 orang terdiri dari anggota FKUB dan sekretariat FKUB, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB. Hasilnya adalah adanya konsep/instrumen untuk anggota melakukan perjalanan Dinas monitoring dan penguatan FKUB di Kabupaten/Kota se NTT dengan prioritas daerah yang rawan konflik dan daerah yang akan menyelenggarakan Pilpres dan Pileg serentak.
- Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan III, pada tanggal 4 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta Rapat 18 orang terdiri dari anggota FKUB Provinsi NTT dan sekretariat FKUB. Hasilnya adalah :
 - Sinergi Rakor dengan Forum yang lain (FPK, FKDM) dan pelaksanaannya pada tanggal 13 September 2019.
 - Rekomendasi rakor harus ada tindakan aksi.
 - Adanya konsep / saran tema.
- Terlaksananya Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 di Aula Hotel Sasando Kota Kupang pada tanggal 13 September 2019. Diikuti oleh Anggota FKUB serta Sekretariat Tk. Provinsi,

Anggota FKUB Tk. Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota sebanyak 60 orang.

Hasil Rekomendasi Rapat Kerja FKUB adalah :

- FKUB diharapkan dapat memperbanyak intensitas dialog dengan memperluas kelompok kategorial dan diperkaya dengan bentuk kegiatan yang bervariasi .
 - Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FKUB sampai ditingkat Kecamatan bahkan sampai di tingkat Desa/ Kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat memberi dukungan bagi keberlangsungan kerukunan umat beragama dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di Nusa Tenggara Timur, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
 - Penguatan Kelembagaan FKUB di Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Kegiatan Penguatan FKUB di 6 Kabupaten/ Kota (Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Manggarai Barat dan Rote Ndao) dengan hasil terwujudnya penguatan FKUB Kabupaten/Kota melalui sinergi program/kegiatan dan pemberian penghargaan berupa honor kepada 21 (dua puluh satu) orang anggota FKUB Provinsi NTT.

2) Penguatan Kelembagaan FKDM

- Terlaksananya Rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi NTT ke I, pada tanggal 17 Juli 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan sekretariat FKDM. Hasil rapat adalah 1). Forum harus mempunyai data dan informasi. 2). Memaksimalkan peran dan fungsi FKDM dengan perluasan jejaring kerja. 3). Bersinergi program dengan FPK dan FKUB .
- Terlaksananya kegiatan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II, pada tanggal 9 Agustus 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah : anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekretariat

FKDM. Hasilnya adalah 1). FKDM siap menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019. 2). Adanya konsep/skenario Rapat Koordinasi Forum-Forum (FPK, FKUB, FKDM) Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT. 3). Terkait masalah penyerangan mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang, maka perlu diberikan pemahaman kepada generasi masa kini tentang pentingnya memupuk persatuan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan saling menghargai meskipun berbeda, tapi kita tetap satu karena ada yang mengikat kita yaitu Pancasila. 4) Kita harus tetap menjaga agar jangan sampai NTT terprovokasi dengan berbagai isu-isu yang mengarah kepada perpecahan. 5). Kaitan dengan belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Malaka, maka perlu anggota Tim FKDM Provinsi melakukan penguatan ke Pemerintah Kabupaten Malaka dan sekaligus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemerintah kabupaten bermitra dengan Forum-Forum guna bersama-sama melakukan fungsi Kewaspadaan Dini terhadap berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang akan mengancam keamanan daerah.

- Terlaksananya kegiatan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke III, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah Anggota FKDM dan Sekretariat FKDM. Hasilnya adalah 1) Adanya komitmen FKDM untuk mendukung Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta program kerja Badan Kesbangpol Provinsi NTT, khususnya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap aman dan kondusif. 2) Kaitan dengan hal di atas, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mengharapkan agar Program strategis yang telah dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT harus benar - benar diimplementasikan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat. 3) Perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait fenomena akhir-akhir ini, banyak peneliti dari luar daerah yang sering melakukan penelitian dan kajian hanya terfokus di satu Kabupaten. 4) Dalam rangka Kewaspadaan Nasional, maka perlu pelibatan semua institusi untuk meningkatkan semangat kebersamaan dengan seluruh tokoh agama

dan tokoh pemuda (GMNI, GMKI, PMKRI, HMI) agar dapat membangun pemahaman yang sama dalam meningkatkan Kewaspadaan Dini terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 5) Rapat Kerja Forum-Forum (FKDM, FKUB, FKDM) Kabupaten/Kota se NTT perlu disinergikan pelaksanaannya agar peran masing-masing forum sebagai mitra pemerintah dapat berjalan maksimal dan direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 13 September 2019.

- Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat, 13 September 2019, bertempat di Aula Hotel Sasando-Kota Kupang. Peserta rapat berjumlah 60 orang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi, Ketua FKDM Kabupaten/Kota, Anggota FKDM Tingkat Provinsi NTT, Dit Intelkam Polda NTT, Kasi Intel Korem 161/WS, Binda NTT. Hasilnya adalah 1). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah deteksi dini berkewajiban memberikan informasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan berbagai potensi konflik, bencana (banjir, kekeringan) maupun ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 2). Pembentukan FKDM sampai ke tingkat kecamatan. 3). Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberi dukungan dan perhatian kepada FKDM Tingkat Kabupaten/Kota.

3) Penguatan Kelembagaan FKDM di Kabupaten/Kota.

- Pelaksanaan Penguatan di Kabupaten TTS, Ngada, Flores Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Hasilnya adalah terwujudnya penguatan FKDM di 6 Kabupaten yaitu :
 - Mendorong pembentukan FKDM sampai ke tingkat kecamatan;
 - Mendorong Kabupaten Malaka membentuk FKDM;
 - Sosialisasi dan sinergi program dan kegiatan.
- Pemberian penghargaan berupa honor kepada 5 (lima) anggota FKDM Provinsi NTT.

4) Penguatan Kelembagaan FPK.

- Penguatan Kelembagaan FPK di 8 (delapan) Kabupaten dengan hasil:
 - Mendorong pemerintah Kabupaten Malaka membentuk OPD Kesbangpol sehingga dapat fasilitasi pembentukan Forum-Forum yang akan menjadi Mitra Pemerintah. Hasilnya Pemerintah Kabupaten Malaka telah membentuk Perangkat Daerah Badan Kesbangpol.

- Pemerintah Kabupaten Alor mendukung dan fasilitasi FPK Kabupaten Alor untuk meningkatkan perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Alor.
- Mendorong FPK di Kabupaten Sabu Raijua untuk memaksimalkan perannya sesuai PERMEN Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- Mendorong pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Rote Ndao, Sikka, TTU, dan TTS untuk memberi perhatian dan fasilitasi FPK yang sudah terbentuk sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Pemberian penghargaan berupa honor kepada anggota FPK.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke I, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah : anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Sekretariat FPK Provinsi NTT. Hasilnya adalah :
 - FPK perlu memberi perhatian dan menjaga hubungan antar ras, etnik, suku, agama dan golongan serta asal daerah menjelang pelaksanaan Politik di Daerah.
 - Mendorong pemerintah menyelesaikan Pembangunan Monumen Pancasila.
 - Terinformasinya kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.
 - Pergantian anggota FPK yang tidak aktif.
- Terselenggaranya rapat koordinasi FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II, pada tanggal 10 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan sekretariat FPK Provinsi NTT. Hasilnya adalah : Perlunya pemahaman bagi Komunitas dalam Wilayah NTT dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.
- Terselenggaranya rapat koordinasi FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke III, pada tanggal 5 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota FPK dan sekretariat FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Ketua FPK Kabupaten Sabu Raijua. Hasilnya adalah :

Penetapan waktu dan skenario Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dengan Para Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota serta Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota pada Minggu ke 3 bulan September 2019.

- Terselenggaranya rapat kerja FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2019, bertempat di Aula Hotel Sasando - Kota Kupang. Peserta rapat terdiri dari Anggota FPK Tingkat Provinsi, Ketua FPK Kabupaten/Kota, Ketua-ketua etnis di NTT. Hasilnya adalah : Adanya rekomendasi sebagai berikut : 1). Pembangunan monument Pancasila dilanjutkan sesuai kemampuan keuangan daerah; 2). Perlu dilakukan pertemuan antar lintas generasi dan etnis pada setiap HUT Kemerdekaan RI diseluruh NTT; 3). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FPK sampai di tingkat Kecamatan, bahkan sampai di tingkat Desa / Kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; 4). Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota diharapkan dapat memberi dukungan bagi keberlangsungan pembauran kebangsaan dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di NTT.

2. Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Politik.

a) Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

- Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di 22 Kabupaten/Kota. Hasilnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif terhadap perkembangan dinamika masyarakat di Daerah antara lain : 1). Pemetaan lokasi-lokasi rawan konflik sosial sekaligus melakukan pemantauan secara kontinyu. 2). Rapat-rapat koordinasi dengan Forum-forum terkait yaitu FKUB, FPK, FKDM dan Kominda dalam rangka mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3). Menggelar forum-forum dialog dengan pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam rangka rekonsiliasi harmonisasi sosial kemasyarakatan yang rukun dan harmonis. 4). Secara umum, perkembangan situasi dan kondisi sosial politik masyarakat di Kabupaten / Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Pra Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 (H-7) berdasarkan hasil monitoring dan koordinasi dengan

instansi terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih tetap kondusif, artinya tidak terjadi tindakan-tindakan instabilitas di daerah yang dapat diduga menciderai stigma Luber dan Jurdil dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 walaupun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Serentak Tahun 2019 telah dipublikasikan di tingkat TPS dan PPK. 5). Kekurangan Logistik di beberapa TPS di tingkat Kecamatan masih terus diupayakan distribusinya.

b) Pemantauan Kegiatan Pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Kegiatan Pasca Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan proses Pemungutan Suara Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019, di rekomendasikan kepada 18 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, dengan rincian :

No	Kabupaten / Kota	PSL	PSU	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih/ Orang
1	Sikka	✓		5	855
2	Kota Kupang		✓	3	707
3	Kupang	✓		3	768
4	TTS	✓		12	2.041
5	TTU	✓		1	237
6	Belu	✓		1	139
7	Malaka	✓		2	471
8	Lembata	✓		2	379
9	Ende	✓		3	488
10	Ngada	✓		1	245
11	Nagekeo	✓		2	458
12	Manggarai	✓		5	1.236
13	Manggarai Barat	✓		2	325
14	Sumba Timur	✓		5	1.245
15	Sumba Tengah	✓		1	178
16	Sumba Barat Daya	✓		1	231
17	Rote Ndao	✓		1	191
18	Sabu Raijua	✓		2	425

- Data Perolehan Suara Pemilu Serentak Kabupaten Kota se Provinsi NTT.
Tingkat partisipasi politik pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se NTT sangat variatif, namun cukup signifikan bila dibandingkan dengan Pemilu/Pilkada sebelumnya karena prosentase partisipasi politik masyarakat semua Kabupaten/Kota menembus diatas rata-rata nasional yaitu 75,00 persen. Data partisipasi politik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se NTT :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Masuk /Partisipasi (%)	Suara Tdk Masuk /Golput (%)
1	Kota Kupang	252.128	116.709; (79,74)	51.076; (19,26)
2	Kab. Kupang	222.020	180.525; (81,31)	41.495; (18,74)
3	TTS	299.838	230.740; (76,95)	69.098; (23,05)
4	TTU	168.049	132.966; (79,12)	35.083; (20,88)
5	Belu	134.122	101.323; (75,55)	32.799; (24,45)
6	Alor	136.718	116.079; (84,90)	20.639; (15,10)
7	Flores Timur	164.513	134.267; (81,61)	30.246; (18,49)
8	Lembata	82.312	68.663; (83,42)	13.649; (16,58)
9	Sikka	197.823	171.330; (86,61)	26.493; (13,39)
10	Ende	168,266	147.946; (87,92)	20.320; (12,08)
11	Nagekeo	100.493	80.115; (79,72)	20.378; (20,28)
12	Ngada	107.427	84.545; (78,70)	22.882; (21,30)
13	Manggarai	209.839	167.140; (79,65)	42.699; (20,35)
14	Manggarai Barat	167.880	138.724; (82,63)	29.156; (17,37)
15	Manggarai Timur	199.335	151.326; (75,92)	48.009; (24,08)
16	Sumba Timur	167.712	131.696; (78,53)	36.016; (21,47)
17	Sumba Barat	79.319	61.166; (77,11)	18.153; (22,89)
18	Sumba Tengah	49.249	38.700; (78,58)	10.549; (21,42)
19	Sumba Barat Daya	225.200	174.495; (77,48)	50.705; (22,52)
20	Rote Ndao	88.853	71.335; (80,28)	17.518; (19,72)

21	Sabu Raijua	53.812	42.020; (78,09)	11.792; (21,91)
22	Malaka	122.361	92.310; (75,44)	30.051; (24,66)
Provinsi NTT		3.397.269	2.718.463; (80,01)	876.806; (19,99)

- Pelanggaran Pemilu 2019.

Secara kuantitatif, pelanggaran yang terjadi sejak Tahap Pendaftaran Pemilih (DP4) hingga Tahap Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Pasca) Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 87 kasus dengan rincian; Temuan oleh Bawaslu sebanyak 42 kasus dan Laporan Masyarakat sebanyak 45 kasus.

Khusus pelanggaran pada periode Pasca Pemilu 2019 (17 April 2019 hingga Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara) tercatat sebanyak 32 kasus dengan rincian yakni Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota sebanyak 19 kasus dan Laporan Masyarakat sebanyak 13 kasus. Dari 32 pelanggaran tersebut, 2 kasus diantaranya tidak diregistrasi sedangkan 30 kasus diregistrasi oleh Bawaslu dan setelah diverifikasi lebih lanjut, terdapat 14 kasus dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga jumlah pelanggaran yang benar-benar memenuhi syarat formil maupun materil sebanyak 18 kasus dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi sebanyak 1 kasus;
- Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus;
- Pelanggaran Pidana sebanyak 13 kasus;
- Pelanggaran lainnya sebanyak 2 kasus.

Bawaslu Kabupaten/Kota se NTT telah memproses sebanyak 12 (dua belas) kasus pelanggaran Pidana Pemilu hingga putusan Pengadilan. Sedangkan penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan pelanggaran lainnya dilakukan dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu (KPU) seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Penghitungan Suara Ulang di Tingkat TPS dan lain sebagainya. Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang merekomendasikan kepada KPU di daerah untuk melaksanakan PSU dan PSL adalah bukti profesionalisme yang patut diberi apresiasi.

Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.

Data hasil perolehan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencatat bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Ir. Joko Widodo dan Prof. Ma'ruf Amin) masih mendominasi perolehan suara di Kabupaten / Kota se NTT.

c) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 28 Februari 2019, di Aula Kantor Lurah Tufneno Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten TTS atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula Sekda Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 12 Maret 2019, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten Flores Timur atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula BKD Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 22 Maret 2019, dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula Hotel Pelangi-Borong Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 25 Maret 2019, dibuka oleh Bupati Manggarai Timur, atas nama Gubernur NTT dihadiri pula oleh Wakil Bupati Manggarai Timur.

Peserta dari masing-masing kabupaten berjumlah 40 orang yang terdiri dari: Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Masyarakat, Aparatur Badan Kesbangpol, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Pemilih Pemula (Pelajar tingkat SLTA), Instansi Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten. Hasilnya adalah :

- Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan adanya pemahaman bagi 160 orang perwakilan peserta dari Kabupaten TTS, Flotim, SBD dan Kabupaten Manggarai Timur tentang Pemilu.

d) Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 1). Terlaksananya Rapat Tim Bantuan Keuangan Parpol Verifikasi Data Kelembagaan Parpol masing-masing :
 - Penyerahan LPJ Bantuan Keuangan ParPol kepada BPK, pada hari Selasa,

29 Januari 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7, Badan Kesbangpol Prov. NTT, Parpol dan BPK. Hasilnya adalah : Diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol dari Partai Politik kepada BPK NTT.

- Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan ParPol pada tanggal 14 Maret 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov. NTT. Hasilnya adalah : Terverifikasinya administrasi pencairan bantuan keuangan parpol, untuk selanjutnya disampaikan permohonan persetujuan pencairan oleh Gubernur yang akan ditindak lanjuti oleh Badan Kuangan Daerah Provinsi NTT.
- Rapat Tim Verifikasi Triwulanan pada tanggal 11 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta rapat berjumlah 25 orang terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov. NTT. Hasilnya adalah : 1). Terevaluasinya LHP BPK perwakilan NTT dan adanya peningkatan terhadap kepatuhan dalam mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol dengan Predikat telah “Memadai” dari 2 (dua) Parpol di T.A 2017 menjadi 5 (lima) Parpol di T.A 2018 yaitu : Partai GOLKAR, Partai NASDEM, Partai PAN, Partai HANURA, Partai PKS. 2). Terealisasinya bantuan Keuangan Parpol tahap I kepada 10 (sepuluh) Parpol hasil Pemilu 2014 melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 3). Adanya Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : BKP.B.200/63/Pol/10/2019, tanggal 16 September 2019 perihal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 untuk pencairan tahap II hasil Pemilu 2019.
- Rapat Tim Verifikasi Triwulan pada tanggal 30 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta terdiri dari Tim 7, Badan Kesbangpol Provinsi NTT dan Parpol. Hasilnya adalah : Adanya komitmen Parpol bahwa Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu yaitu pada bulan Januari tahun berjalan.

2). Pelaksanaan perjalanan dinas Hasil penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi.

Tersedianya dokumen penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Waktu pelaksanaan Bulan Pebruari s/d November.

Hasilnya adalah :

- 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai dan Sumba Barat Daya sebagai representasi dari 22 Kabupaten dan Kota se NTT menunjukkan adanya peningkatan peran dan fungsi parpol di daerah. Hal ini terlihat dari penilaian dan pengkajian bantuan keuangan kepada partai politik yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang kesemuanya dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar penggunaan dana bantuan keuangan partai politik.
- Bantuan Keuangan kepada Parpol Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi NTT diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- Peran Parpol untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Parpol itu sendiri. Parpol perlu mempunyai pemahaman yang memadai tentang bagaimana pengelolaan dana bantuan bagi parpol.
- Realisasi bantuan keuangan partai politik Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	NILAI PER SUARA SEBELUM BERLAKU PP NO.1 THN 2018	NILAI PER SUARA SESUDAH BERLAKU PP NO 1 THN 2018	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI PEMILU 2004-2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (APBD 2019)
1	Nusa Tenggara Timur	Rp. 559,81.	Rp. 1.200	2.018.501.	Rp. 2.422.201,200.-
2	Sabu Raijua	Rp. 11.778.	Rp. 13.278	33.961.	Rp. 600.000.000.-
3	Sumba Timur	Rp. 8.281,291.	Rp. 8.281,291	102.641.	Rp. 850.000.000.-
4	Sumba Tengah	Rp. 13.387.	Rp. 13.387.	29.879.	Rp. 399.989.900.-
5	Sumba Barat	Rp. 15.652.	Rp. 15.652.	44.722.	Rp. 699.988.740.-
6	Sumba Barat Daya	Rp. 7.094.	Rp. 7.094.	160.388	Rp. 1.137.792.900.-
7	Flores Timur	Rp. 4.713.	Rp. 4.713.	112.527.	Rp. 530.339.751.-
8	Ende	Rp. 8.271.	Rp. 8.271.	85.673.	Rp. 708.650.773.-

9	Sikka	Rp. 4.829.	Rp. 1.500.	148.146.	Rp. 715.397.577.-
10	Kota Kupang	Rp. 4.464.	Rp. 4.464.	167.069.	Rp. 745.796.016.-
11	Nagekeo	Rp. 10.300.	Rp. 10.300.	69.754.	Rp. 718.466.200.-
12	Manggarai Barat	Rp. 5.621.	Rp. 5.621.	121.071.	Rp. 680.540.091.-
13	Manggarai Timur	Rp. 4.120.	Rp. 4.120.	125.827.	Rp. 518.407.240.-
14	Rote Ndao	Rp. 9.327.	Rp. 9.327.	60.642.	Rp. 565.607.934.-
15	Kupang	Rp. 4.900.	Rp. 4.900.	144.646.	Rp. 708.765.400.-
16	Timor Tengah Selatan	Rp. 2.969.	Rp. 1.500.	197.151.	Rp. 295.726.500.-
17	Timor Tengah Utara	Rp. 5.806.	Rp. 5.806.	114.016.	Rp. 661.978.000.-
18	Belu	Rp. 5.666.	Rp. 5.666.	85.548.	Rp. 484.714.968.-
19	Alor	Rp. 4.992.	Rp. 4.992.	100.308.	Rp. 500.738.000.-
20	Malaka	Rp. 5.666.	Rp. 5.666	79.191	Rp. 426.389.164.-

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	NILAI PER SUARA SEBELUM BERLAKU PP NO.1 THN 2018	NILAI PER SUARA SESUDAH BERLAKU PP NO 1 THN 2018	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI PEMILU 2004-2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (APBD 2019)
21	Ngada	Rp. 12.989,905	Rp. 12.989,905	64.545	Rp. 838.433.417.-
22	Manggarai	Rp. 4.120.	Rp. 4.120.	145.853.	Rp. 600.790.760.-
23	Lembata	Rp. 9.035	Rp. 9.035	59.039	Rp. 533.299.297.-

e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Tahun 2019, di 14 Kabupaten/ Kota. Dengan hasil adalah 1). Pelaksanaan program dan kegiatan masih bersifat sektoral. 2). Sinkronisasi program dan kegiatan. 3). Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 4). Semakin maraknya paham lain dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui media massa. 5). Kurangnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial. 6). Data dan informasi masalah-masalah aktual di daerah masih bersifat parsial dan kondisional.

f) Kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi.

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketahanan Keagamaan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Rumah Bina Kerahiman Ilahi Ende, dengan Tema “Merekatkan Kebersamaan Hidup yang Rukun Dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Adapun peserta kegiatan berjumlah 90 (Sembilan puluh) orang terdiri dari Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, FKUB Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT. Hasilnya adalah dikeluarkannya Surat Gubernur NTT kepada Walikota Kupang dan Para Bupati se NTT Nomor : BU.450/08/BKBP/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Penyampaian Hasil Rakor untuk ditindak lanjuti yaitu :
 - Badan Kesbangpol memiliki posisi yang strategis karena selain mengawal urusan pemerintahan umum (4 konsensus Nasional, Politik dan Demokrasi, Ketentraman, ketertiban dan kewaspadaaan Nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi), sekaligus menjadi mata dan

telinga bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai aspek pra kondisi yang bersifat non fisik sebagai prasyarat utama bagi pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik, maka peran dan fungsi Badan Kesbangpol perlu mendapat perhatian.

- FKUB adalah mitra pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, maka perlu mendapat perhatian khususnya dalam hal penguatan kelembagaan, fungsi dan tugas forum dimaksud.
 - Perlu adanya sinergitas program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Badan Kesbangpol Provinsi.
 - Perlu adanya sinergitas program dan kegiatan FKUB Kabupaten/Kota se NTT dengan FKUB Provinsi.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi pada tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Aula Kantor Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Adapun peserta kegiatan berjumlah 90 (Sembilan puluh) orang terdiri dari: UMKM, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasilnya adalah adanya rekomendasi :
- Pembentukan Pokja ketahanan ekonomi untuk membuat RAN Aksi, pemantauan, data evaluasi (kolaborasi dengan beberapa tim yang sudah dibentuk).
 - Sasaran : Lokasi usaha tambak garam yang berfokus pada Desa Nunkurus, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang (kolaborasi dengan biro ekonomi); Lokasi destinasi wisata (pilot project mengukur kontribusi pariwisata terhadap PDRB); Cluster komoditi usaha ekonomi cabe rawit dan ayam potong; Kolaborasi antara pihak swasta, Pemda dan masyarakat.
 - Penetapan kawasan dalam pengembangan ekonomi kreatif Sasaran : Skala Kecil : Kuliner, dll. Skala Besar : Kolaborasi kegiatan dengan 22 Desa/Kelurahan model yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim PKK Provinsi NTT di 22 Kab/Kota se NTT.
 - Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana dengan prioritas infrastruktur ke daerah-daerah destinasi wisata dan atau daerah potensi pengembangan Sumber Daya Alam.
 - BI, OJK, dan dinas Kopnakertrans bekerja sama memfasilitasi SKIM kredit kepada pelaku UMKM.
 - Lembaga perguruan tinggi memberikan konsep pengembangan ekonomi kreatif melalui hasil penelitian.
 - Mengundang investor untuk pendampingan financing di luar APBD.

- Telaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengambilan data Ormas/LSM di 10 Kabupaten/Kota yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat dengan hasil adalah :
 - Kabupaten Manggarai Barat : 19 Ormas/ LSM yang diusulkan terdapat 9 yang sudah mendapat nomor SKT, 10 masih dalam tahap verifikasi.
 - Kabupaten Alor : 11 Ormas/ LSM yang mengusulkan, 11 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Manggarai : 8 Ormas/LSM yang mengusulkan, 8 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kota Kupang : 23 Ormas/LSM yang mengusulkan, 23 belum mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Flores Timur : 56 Ormas/LSM yang mendaftar, 56 yang belum mendapat nomor SKT .
 - Kabupaten Kupang : 36 Ormas/LSM yang mendaftar, 36 belum mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten TTS : 35 Ormas/LSM yang mendaftar, 35 belum mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Belu : 80 Ormas/LSM yang mendaftar, 15 yang telah mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten TTU : 23 Ormas/LSM yang mendaftar, 20 yang telah mendapat nomor SKT.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pembinaan Wawasan Politik Kebangsaan.	Jumlah presentase terkait Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Politik, Kwaspadan Nasional dan Ketahanan	60	60	100

Analisis Capaian Realisasi Kegiatan Wawasan Politik Kebangsaan

Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak terlepas dari Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan **Wawasan Kebangsaan** yang memuat cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi kebangsaan yang berwujud cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaga upaya perekatan dan integrasi nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah (driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mempertahankan kelangsungan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu strategi dan kebijakan yang ditempuh yaitu Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen strategis sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Pencapaian sasaran ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Kegiatan Pembinaan Ideologi
Tahun 2019

No.	Kegiatan	Sasaran Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Lokasi	Volume
1.	Dialog pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila lintas generasi	Pemuka Agama, Tomas, Mahasiswa/Perguruan Tinggi, Ormas/LSM, Tokoh Pemuda, Pengurus Parpol, Ormas, LSM, Pelajar	Ende	1
2.	Forum komunikasi Revitalisasi Pancasila.	Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus partai politik, Ormas, LSM, mahasiswa dan Pelajar	Ende	1
3	Lomba Pidato	Pelajar SLTA Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	1
4	Dialog Interaktif Radio	Masyarakat Luas	Kupang	1
5	Dialog Interaktif TVRI	Masyarakat Luas	Kupang	2
6	Sosialisasi wawasan kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara	Masyarakat di daerah perbatasan	Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur dan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka	2
7	Kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di	Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten	Kabupaten Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat	3
8	Rapat FPK dan Penguatan FPK di daerah	Anggota FPK Tingkat Provinsi, Ketua FPK Kabupaten/Kota, Ketua-ketua etnis di NTT.	Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Malaka, Alor,	12

			Rote Ndao, Sikka, TTU, Sabu Raijua dan TTS	
--	--	--	--	--

No.	Kegiatan	Sasaran Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Lokasi	Volume
9	Rapat FKUB, Penguatan FKUB di daerah.	Anggota FKUB serta Sekretariat Tk. Provinsi, Anggota FKUB Tk. Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Manggarai Barat dan Rote Ndao	10
JUMLAH				33

3. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional

- a) Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Gangguan Konflik sosial Kabupaten/Kota dan Tk. Provinsi di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada tanggal 11 April 2019, peserta kegiatan berjumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) orang terdiri dari: FORKOPIMDA NTT, BINDA NTT, Forum-forum tingkat Provinsi NTT (FPK, FKUB, FKDM), Pimpinan Agama, OPD terkait tingkat Provinsi NTT, BUMN (PLN, Telkom dan Pertamina), serta Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur. Hasilnya adalah terinventarisasinya masalah-masalah Pemilu dan langkah solusi serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan pemerintah daerah, TNI/POLRI serta instansi terkait sebagai berikut :
- Menjelang penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih kekurangan 808.459 surat suara. Pergantian terhadap surat suara Pemilu 2019 yang rusak, dilakukan distribusi mulai pada Sabtu (13/4/2019) atau **H-4** Pemilu .
 - Dari isu dan perkiraan potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilu 2019, POLRI telah menetapkan zone di setiap daerah yang menjadi konsentrasi pengamanan. Hasil Pemantauan secara umum situasi pelaksanaan Pemilu aman, tidak ada Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG). Petugas TNI / POLRI siap mengamankan jalannya momentum Pemilu Serentak tahun 2019 diseluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemda berkewajiban melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan pembentukan Satgas Penanganan Konflik. TNI siap membantu Kepolisian mengamankan jalannya pemilu serentak 2019.

- Posisi strategis KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mengendalikan keseluruhan tahapan terutama berkaitan dengan logistik, penghitungan suara serta pleno rekapitulasi hasil. KPU juga harus menyediakan skema penyelesaian masalah terkait problem yang mungkin akan terjadi.
 - Bawaslu dalam menegakkan pengawasan pemilu hendaknya dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pendampingan bagi pemilih disabilitas dilaksanakan berdasarkan pasal 43 PKPU nomor 3 tahun 2019. Ada 4 (empat) pendampingan yang dilakukan KPU yaitu Tuna Daksa, Tuna Rungu, Lanjut Usia dan Sakit Parkinson.
 - Penyelenggara Pemilu tingkat KPPS, PPS, PPK harus bertindak netral dan profesional.
 - BMKG siap memberikan informasi anomali cuaca tiap hari melalui media yang telah disediakan.
 - PLN, Telkom, dan Pertamina siap terkait dengan ketersediaan jaringan listrik, internet, dan stok BBM pada saat hari H dan pasca pemilu.
 - Para Pimpinan Agama menyampaikan himbauan, seruan, ajakan, kepada umat agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab pada saat pra, hari H, dan pasca Pemilu.
- b) Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, pada hari Jumat, 5 April 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 30 orang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Polda NTT, Korem 161 WS Kupang, Badan Intelijen Daerah Provinsi NTT, Lanud El Tari Kupang, Intel Lantamal VII Kupang, Kanwil Agama NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Dinas Kominfo Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT, Biro Pemerintahan Prov. NTT, Badan PSDMD Provinsi NTT, Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, BP3TKI Kupang, Kanwil PPTP Kementerian Pertahanan NTT. Hasil rapat adalah :
- Data Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi NTT untuk periode Januari s/d April 2019 (B.04) oleh setiap OPD dan instansi terkait diserahkan sebelum tanggal 05 Mei 2019 beserta data pendukungnya.
- Penyampaian dokumen Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi sebagai berikut :
- Aktivitas Pertemuan sosialisasi, penyuluhan, rapat; dokumennya berupa Notulensi, Daftar hadir, Foto kegiatan, Materi;

- Aktivitas pertemuan seperti dialog, talkshow, atau kegiatan lainnya melalui media TV atau radio; dokumennya berupa foto/video pada saat kegiatan tersebut berlangsung.
 - Penerbitan izin, surat keputusan, peraturan, MOU/Nota Kesepakatan, pelaporan data kasus konflik, dan lain-lain; dokumennya telah ditandatangani pejabat terkait.
 - Kegiatan Lapangan, dalam bentuk simulasi, pemantauan /pengawasan, penghentian konflik, dan lain-lain; dokumennya berupa foto atau materi (data hasil kegiatan lapangan).
- c) Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi (B08), pada hari Selasa, 6 Agustus 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT- Kota Kupang. Peserta 30 orang yang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Polda NTT, Korem 161 WS Kupang, Badan Intelgen Daerah Provinsi NTT, Lanud El Tari Kupang, Intel Lantamal VII Kupang, Kanwil Agama NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan Nakertrnas Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan PSDMD Provinsi NTT, BP3TKI Kupang. Hasil rapat adalah :
- d) Terinformasinya Hasil Evaluasi Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional tanggal 11 Juli 2019 di Makasar sebagai berikut :

**DAFTAR PERINGKAT HASIL EVALUASI LAPORAN RENCANA AKSI
TARGET B.04 TAHUN 2019 WILAYAH TIMUR**

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)
1.	Nusa Tenggara Timur	1	87.05%
2.	Maluku Utara	2	85.79%
3.	Kalimantan Selatan	3	81.31%
4.	Papua Barat	4	81.17%
5.	Bali	5	74.89%
6.	Kalimantan Tengah	6	74.25%
7.	Kalimantan Timur	7	73.25%
8.	Gorontalo	8	71.4%
9.	Sulawesi Tengah	9	64.33%
10.	Sulawesi Selatan	10	62.93%
11.	Sulawesi Utara	11	55%
12.	Nusa Tenggara Barat	12	48.23%
13.	Kalimantan Utara	13	46.66%
14.	Sulawesi Barat	14	44.93%
15.	Kalimantan Barat	15	38.94%
16.	Sulawesi Tenggara	16	22.33%
17.	Maluku	17	16%
18.	Papua	18	0.0%

- e) Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi (B12),

pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 30 orang yang terdiri dari Kanwil Agama NTT, Kanwil KumHam Provinsi NTT, Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan Nakertrnas Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan PSDMD Provinsi NTT, BP3TKI Kupang. Hasilnya adalah :

- Adanya komitmen OPD dan Instansi terkait untuk segera melaporkan Rencana Aksi B.12 Tahun 2019, sebelum tanggal 15 Desember 2019.
- Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 sebanyak 19 (Sembilan belas) Rencana Aksi, terdapat 4 (empat) Rencana Aksi baru.

f) Terlaksananya Bimtek / TOT Community Policing, pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 8 dan 9 Oktober 2019, bertempat di Aula Hotel Swiss Bell Kristal di Kota Kupang. Peserta kegiatan sebanyak 40 orang terdiri dari Babinkamtibmas, ASN Badan Kesbangpol Kota Kupang, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda. Hasilnya 1). Meningkatnya kesiapsiagaan dan keterlibatan secara aktif seluruh instansi terkait untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2). Meningkatnya peran forum-forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, FKUB, dan FPK serta Ormas lainnya dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan penyelesaian potensi gangguan trantibum. 3). Mengaktifkan kembali Siskamling melalui ronda serta mengaktifkan wajib lapor (1 x 24 jam) bagi tamu pendatang.

g) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme: 1) Di Kabupaten Belu, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, bertempat di Aula Hotel Nusantara II Atambua; 2) Di Kabupaten Sikka, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2019, bertempat di Aula Heinrich Maumere. Adapun peserta kegiatan masing-masing kabupaten berjumlah 90 (Sembilan Puluh) orang, terdiri dari Siswa/I SMU, Mahasiswa/I, Aparatur Kesbangpol Kabupaten. Hasilnya adalah :

- Terbangunnya kebersamaan dan semangat yang nyata diantara seluruh peserta dalam rangka menyatukan langkah, tekad, pikiran dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah;
- Menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, paham, dan tindakan kaum Radikalisme yang menggunakan kekerasan dan Terorisme di Wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten;
- Terbangunnya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan;

- Terbangunnya komitmen sinergitas dengan semua pihak secara berkesinambungan untuk mencegah berkembangnya paham Radikalisme dan Aksi Terorisme dengan cara mendata semua warga baru dan menanyakan identitas mereka.
- h) Terlaksananya Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di Kabupaten TTU pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, bertempat di Aula Hotel Litani Kefamenanu. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur TNI, Forum-Forum (FKDM, FKUB, FPT), Kecamatan/Kelurahan, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama. Hasilnya adalah :
- Terbangunnya pemahaman pentingnya kerjasama diantara peserta secara berkesinambungan dalam melakukan deteksi dini, cegah dini, lapor cepat terhadap potensi ancaman timbulnya konflik sosial di daerah;
 - Adanya komitmen untuk memaksimalkan peran RT, RW, Lurah/Kepala Desa, Camat dalam melaporkan setiap kedatangan orang baru di wilayahnya 1 x 24 jam sebagai upaya bersama mengkoordinasikan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum.
 - Pentingnya mulai melakukan hal yang paling kecil yaitu menjaga keluarga dengan cara memberi pengarahan dan penjelasan, peduli terhadap lingkungan dimana kita tinggal dan bila melihat sesuatu yang mencurigakan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan yang terakhir selalu melakukan komunikasi yang baik antar warga.
- i) Terlaksananya Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di Kabupaten Lembata, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, bertempat di Aula Hotel Palm Indah Lewoleba. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari Unsur TNI, POLRI, Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Camat, Lurah, Ormas, tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, ASN Badan Kesbangpol. Hasilnya adalah adanya komitmen :
- Membangun kebersamaan dan semangat yang nyata diantara seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyatukan langkah, tekad, pikiran dan pemahaman yang sama dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.
 - Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda secara berkesinambungan agar dapat melakukan deteksi dini, cegah dini, lapor cepat terhadap potensi ancaman timbulnya konflik sosial di daerah.

- Pembentukan Forum-Forum (FKDM, FPK, FKUB) sampai ke tingkat Kecamatan.
 - Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan akan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas warga masyarakat eks gafatar agar tidak mempengaruhi masyarakat lainnya untuk mengikuti ajaran dan paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila,
- j) Terlaksananya Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 November 2019, bertempat di Aula Effata St. Aloysius Ruteng. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat. Hasilnya adalah adanya konsep pendekatan yang kondisional (seperti pendekatan prosperity, dan lain-lain) dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah dan keterlibatan pihak-pihak yang menjadi panutan serta memahami silsilah tanah tersebut.
- k) Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

No	Kabupaten	Tanggal	Lokasi Kegiatan
1	Sabu Raijua	17 Oktober 2019	Aula Setda Kab. Sabu Raijua.
2	Ngada	17 Oktober 2019	Aula Gracia Cafe Kota Bajawa
3	Nagekeo	17 Oktober 2019	Aula Hotel Sinar Kasih Mbai
4	Rote Ndao	17 Oktober 2019	Aula ELSAIDAI
5	Alor	17 Oktober 2019	Aula Kantor Koperasi Citra Hidup Tribuana
6	Manggarai	17 Oktober 2019	Aula St.Yoseph Effata Ruteng
7	TTU	17 Oktober 2019	Aula Restoran Litani.
8	Lembata	21 Oktober 2019	Aula SMK Don Bosco Lembata.
9	Sumba Timur	29 Oktober 2019	Aula Gedung Nasional Waingapu.
10	Sumba Tengah	28 Oktober 2019	Aula SMA Kristen Waibakul
11	Sumba Barat	28 Oktober 2019	Aula Wisma Manda Elu
12	TTS	29 Oktober 2019	Aula Hotel Dena Soe
13	Sumba Barat Daya	30 Oktober 2019	Aula SMAK St. Alfonsus Wetebulla
14	Belu.	19 November 2019	Aula Hotel Bahagia II
15	Malaka	19 November 2019	Aula Hotel Ramayana

16	Flores Timur	21 November 2019	Aula Dinas Koperasi
17	Ende	18 November 2019	Aula Sustaran Emaus

No	Kabupaten	Tanggal	Lokasi Kegiatan
18	Mangarai Barat.	26 November 2019	Aula Rumah Singgah SSPS Labuan Bajo/Biara St. Avila
19	Sikka	21 November 2019	Aula FKUB Kabupaten Sikka
20	Mangarai Timur	21 November 2019	Aula Hotel Embun Pagi Borong

Peserta dari masing-masing Kabupaten sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari Siswa SMU/ SMK, Tokoh Pemuda/I, Wartawan, Pemuda Gereja, Pemuda Mesjid, Tokoh Masyarakat. Hasilnya adalah :

- Tersosialisasinya Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Adanya masukan untuk penyusunan juklak/juknis dari Perda.
- Adanya pemahaman tentang bahaya Narkotika.

4. Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing.

a. Terselenggaranya kegiatan Rapat Penanganan Orang Asing dan Lembaga Asing (4 kali) Tingkat Provinsi di Kota Kupang , yaitu :

1) Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT. Hasilnya adalah :

- Semua anggota Tim Koordinasi melakukan peningkatan pemantauan terhadap keberadaan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Tusi masing-masing; namun dalam melakukan pemantauan harus saling bersinergi diantara anggota tim;
- Masing-masing anggota Tim saling memberi informasi data yang valid dan terkini serta dilaporkan ke Dinas Kominfo Provinsi untuk dijadikan NTT satu Data.

2) Pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT, hasilnya adalah :

- Tim Koordinasi perlu melakukan pemantauan dan pengawasan serta koordinasi berlanjut terhadap : 1) 4 (empat) Warga Negara Asing asal Jerman yang melakukan syuting film tentang penutupan sementara Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan di Labuan Bajo.

- 2). Bakti Sosial berupa operasi mata gratis yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing asal Polandia dan Taiwan di Kabupaten Sumba Barat, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 3). Tenaga Kerja Asing khususnya Rohaniawan Islam (Jemaah Tablic) dan Kristen Protestan. 4). Pengungsi Luar Negeri di Kota Kupang berjumlah : 236 orang, dengan rincian : Hotel Kupang INN 73 orang, Hotel Ina Boy 69 orang, Hotel Lavender 92 orang, Rudenim 2 (Imigratoir) orang. Imigratoir berasal dari Negara Bangladesh dan Amerika Serikat, mereka tidak memiliki dokumen dan menunggu untuk dideportasi kembali ke Negara asalnya.
- 3) Pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT. Hasilnya adalah :
- Tim Koordinasi perlu melakukan pemantauan dan pengawasan serta koordinasi berlanjut terhadap : 1) Warga Negara Asing yang melakukan syuting film Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende maupun Kabupaten Sumba Barat. 2) Orang asing baik yang melakukan kunjungan wisatawan maupun yang melakukan Bakti Sosial. 3). 13 Warga Negara India di Kabupaten Kupang dan 8 Warga Negara Amerika di Kabupaten Belu. 4) Orang Asing baik wisatawan asing maupun Tenaga Kerja Asing yang over stay, untuk segera dideportasi ke Negara asalnya.
 - Perlunya masyarakat juga ikut menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua Orang Asing yang berkunjung ke Wilayah Provinsi NTT;
 - Penegasan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing sampai ke tingkat RT/RW;
- 4) Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT. Hasilnya adalah :
- Untuk memaksimalkan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi, maka perlu dilakukan restrukturisasi keanggotaan;
 - Tim koordinasi perlu melakukan Rencana Aksi berupa operasi gabungan bersama baik terhadap Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing, maupun kapal-kapal asing yang masuk;
 - Tim koordinasi melalui Badan Kesbangpol perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang dan sekolah terkait dan memastikan anak-anak

pengungsi luar negeri yang bersekolah di pendidikan formal, apabila tamat tidak diberikan ijazah, hanya boleh diberikan surat keterangan lulus; Telah ditindak lanjuti dengan surat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT Nomor : BKBP.300/63/KN/52/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang.

- Tim koordinasi perlu meningkatkan koordinasinya sehubungan masih ditemukan adanya orang asing yang ijin tinggalnya melebihi batas waktu (*overstay*)
 - Tim koordinasi melalui Rudenim perlu memastikan bahwa dengan ditutupnya Kantor UNHCR di Kupang, tidak menyulitkan dalam penetapan pengungsi atau pencari suaka ketika hendak ditempatkan ke Negara ke tiga.
 - Dari hasil evaluasi selama tahun 2019, ditemukan warga Negara asing yang melakukan bakti sosial berupa pengobatan gratis maupun sunatan massal di Kabupaten yang tidak memiliki ijin kegiatan. Oleh karena itu, diminta semua anggota tim sesuai dengan tupoksi di instansi/lembaga masing-masing terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan jejaring yang ada di Kabupaten/Kota agar terus berbagi informasi dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Provinsi NTT.
- b. Terselenggaranya kegiatan Rapat koordinasi Penanganan Orang Asing Tk.Provinsi dan Kabupaten /Kota se-NTT, dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juni 2019, bertempat di Aula Hotel Pelangi Labuan Bajo - Kabupaten Manggarai Barat. Peserta 50 orang yang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT, Anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Kabupaten Manggarai Barat, Unsur TNI/Polri, Imigrasi, Kecamatan/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama. Hasilnya adalah :
- Perkuat sinergi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melalui Pembentukan regulasi, Pembangunan system, sebelum regulasi terbentuk dan dibangun system, koordinasi dan sinergi pelaksanaan dilakukan melalui whatsapp.
 - Peningkatan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melalui operasi terpadu.
 - Membuat langkah-langkah konkrit untuk pengawasan pergerakan orang asing melalui : Pembuatan zona, Himbauan tertib aktivitas orang asing menggunakan teknologi, Pelaksanaan pekan kewaspadaan dini masyarakat.

5. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

- Terselenggaranya kegiatan pengendalian keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2019 di Gedung Nasional Waingapu-Kabupaten Sumba Timur. Tema : " Pencegahan dan pengendalian kejahatan saat menyongsong pelaksanaan PILEG dan PILPRES ". Peserta 110 orang yang terdiri dari Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda, Tokoh Perempuan, Lurah dan Camat. Hasilnya adalah :
 - Diperlukan adanya kontrol publik dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
 - Membangun sinergitas bersama antara seluruh komponen terkait agar meningkatkan pemahaman tentang pemilu yang berkualitas.
 - Masyarakat harus berani melaporkan tindak kejahatan kepada pihak keamanan dalam proses pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara.
 - Pemetaan titik titik rawan pemilu, kemudian dibahas bersama KOMINDA untuk dicarikan jalan keluar.

Sasaran Kedua :	Strategis	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik
----------------------------	------------------	---

Partai Politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi tersebut, partai politik memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa salah satu sumber keuangan partai politik di Indonesia adalah bantuan keuangan dari pemerintah. sebagai anggaran yang berasal dari dana publik, sudah seharusnya tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dapat mengakomodasi tuntutan prinsip *good governance* dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana publik tersebut maka perlu adanya :

- 1). Rapat Tim Bantuan Keuangan Parpol Verifikasi Data Kelembagaan Parpol masing-masing :
 - Penyerahan LPJ Bantuan Keuangan ParPol kepada BPK, pada hari Selasa, 29 Januari 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7, Badan Kesbangpol Prov.NTT, Parpol dan BPK. Hasilnya adalah : Diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol dari Partai Politik kepada BPK NTT.

- Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan ParPol pada tanggal 14 Maret 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov. NTT. Hasilnya adalah : Terverifikasinya administrasi pencairan bantuan keuangan parpol, untuk selanjutnya disampaikan permohonan persetujuan pencairan oleh Gubernur yang akan ditindak lanjuti oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- Rapat Tim Verifikasi Triwulanan pada tanggal 11 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta rapat berjumlah 25 orang terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov. NTT. Hasilnya adalah : 1). Terevaluasinya LHP BPK perwakilan NTT dan adanya peningkatan terhadap kepatuhan dalam mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol dengan Predikat telah “Memadai” dari 2 (dua) Parpol di T.A 2017 menjadi 5 (lima) Parpol di T.A 2018 yaitu : Partai GOLKAR, Partai NASDEM, Partai PAN, Partai HANURA, Partai PKS. 2). Terealisasinya bantuan Keuangan Parpol tahap I kepada 10 (sepuluh) Parpol hasil Pemilu 2014 melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 3). Adanya Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : BKP.B.200/63/Pol/10/2019, tanggal 16 September 2019 perihal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 untuk pencairan tahap II hasil Pemilu 2019.

Rapat Tim Verifikasi Triwulan pada tanggal 30 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta terdiri dari Tim 7, Badan Kesbangpol Provinsi NTT dan Parpol. Hasilnya adalah : Adanya komitmen Parpol bahwa Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu yaitu pada bulan Januari tahun berjalan.

- 2) Seminar Akhir Pokja IDI Tahun Anggaran 2019, pada hari Selasa, 27 Agustus 2019, bertempat di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT. Peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari Partai Politik: 10 Orang, Tokoh Agama : 2 Orang, Tokoh Masyarakat : 7 Orang, Akademisi : 3 Orang, Organisasi Kepemudaan: 2 Orang , dan Mahasiswa : 2 Orang, Anggota Pokja IDI : 6 Orang, Instansi terkait : 18 orang.

Hasilnya adalah : Berdasarkan rilis hasil IDI tahun 2018 pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh BPS Pusat, maka IDI NTT Tahun 2018 berhasil menempati peringkat 3 Nasional dengan capaian 82,32 poin dengan kategori ‘**Baik**’. Bahwa capaian

hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan NTT berada pada peringkat 3 (tiga) terbaik Nasional, bukan saja dimaknai sebagai suatu kemajuan berdemokrasi NTT tetapi perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku sesuai karakteristik dan budaya politik masyarakat NTT. Selain itu pula hasil IDI tersebut tidak sekedar angka-angka tetapi perlu diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan semua elemen strategis masyarakat terutama berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan pembangunan demokrasi politik pada semua tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena itu peserta berkomitmen untuk mempertahankan capaian hasil IDI yang sudah diperoleh dan bahkan bersinergi untuk meningkatkan capaian indikator hasil IDI NTT tahun 2018 yang berkategori Buruk menjadi kategori Sedang bahkan menuju kategori Baik pada tahun-tahun mendatang.

Terlaksananya Ekspose hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2018, pada hari Jumat, 6 September 2019, bertempat di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT. Peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari Partai Politik: 10 Orang, Tokoh Agama : 2 Orang, Tokoh Masyarakat : 7 Orang, Akademisi : 3 Orang, Organisasi Kepemudaan : 2 Orang, dan Mahasiswa : 2 Orang, Anggota Pokja IDI : 6 Orang, Instansi terkait : 18 orang. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan 1) Peserta berkomitmen menjadi corong pemerintah dan Pokja IDI NTT untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat di lingkungan kerjanya masing-masing terkait pentingnya pemanfaatan hasil IDI bagi perencanaan pembangunan demokrasi politik sebagaimana informasi dan masukan yang diperoleh melalui kegiatan Ekspose ini baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 2) Peserta juga mengharapkan agar capaian hasil IDI NTT tahun 2018 hendaknya dipublikasikan melalui media massa (cetak dan sosial media lainnya) sehingga makna IDI semakin dipahami secara luas. 3) Pemerintah dan Seluruh Elemen strategis terus meningkatkan komunikasi, kerjasama dan membangun sinergitas sehingga mampu mempertahankan hasil IDI 2018 sekaligus terus berupaya untuk meningkatkan capaian indikator IDI NTT yang masih berkategori Buruk dan kategori *Sedang* menjadi kategori *Baik*.

4) Bahwa output dari kegiatan ini perlu dituangkan dalam Rencana Aksi (RA) serta dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik pemerintah, lembaga sipil, media massa, perguruan tinggi, kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya. 5) Aspek

Kebebasan Sipil (*civil libertis*) di Nusa Tenggara Timur menempati posisi yang sangat baik karena dukungan nilai-nilai sosial-budaya antara lain : nilai tolong-menolong, nilai kekeluargaan karena civil society sebagai pilar demokrasi dan nilai persaudaraan.

- Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Hasil IDI di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten TTS, TTU, Belu, Alor, Ende, Rote Ndao.

Hasilnya adalah terinformasinya hasil rilis IDI NTT tahun 2018 ke 6 (enam) Kabupaten mengingat hasil survey data IDI lebih banyak diambil dari Kabupaten / Kota, sedangkan Pemerintah Kabupaten / Kota belum melakukan kegiatan IDI. 6 (enam) Kabupaten tersebut dapat memakai hasil IDI sebagai perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing.

Sasaran strategis kedua sebagaimana diatas, diukur dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik. Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik	Jumlah Partai Politik berdasarkan dokumen penilaian dan hasil kajian bantuan keuangan Parpol 2019-2024	10	11	110

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kedua tersebut di atas diukur dengan indikator kinerja : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT

Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
-----	---------	-------------------	--------	-----------	-------------

1.	Terwujudnya pembangunan demokrasi dan politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT.	80	82.32	102.90
----	---	---	----	-------	--------

Analisis Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi khas Indonesia, yang memang dirancang untuk sensitif terhadap perkembangan kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam proses, penyusunan IDI juga melibatkan Pemerintah Provinsi, DPRD, LSM, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan pekerja media di masing-masing provinsi. Aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI adalah: Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy). Ketiga aspek tersebut merupakan pilar dari konsep demokrasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi atas konsep demokrasi, sedangkan aspek ketiga merefleksikan wadah dari proses demokrasi. Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties) mencakup 4 (empat) variabel, yaitu: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, serta Kebebasan dari Diskriminasi. Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) mencakup 2 (dua) variabel, yaitu: Hak Memilih dan Dipilih, serta Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Sementara aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) mencakup 5 (lima) variabel, yaitu: Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Peradilan yang Independen. Kesebelas variabel pada masing-masing aspek tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 28 indikator pengukuran dan penilaian Hasil IDI secara universal.

Untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia agar mencapai kategori baik maka diperlukan beberapa langkah pengembangan IDI, antara lain .

1. Meningkatkan peran dan tanggungjawab Pemerintah dan semua unsur terkait, sebagai aktor penjaring data dalam masyarakat guna memperoleh data yang valid terhadap jalannya proses pembangunan demokrasi untuk pencapaian kesejahteraan bersama;

2. Pentingnya pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi di Nusa Tenggara Timur;
3. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah yang terkait dengan Aspek-aspek IDI berdasarkan indeks yang dihasilkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pencapaian angka Indeks yang masih rendah;

Tersosialisasinya peran dan keberadaan Pokja IDI di Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan hasil pencapaian Indeks dari tahun ke tahun.

Dalam pencapaian sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Kegiatan Wawasan Kebangsaan
Dalam Rangka Sasaran Peningkatan Wawasan Politik Kebangsaan
Tahun 2019

No.	Kegiatan	Sasaran Peningkatan Wawasan Politik Kebangsaan	Lokasi	Volume
1.	Lomba Pidato wawasan Kebangsaan	Pelajar SMA dan SMK se Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2 kali
2.	Dialog Interaktif Radio	Masyarakat Luas	Kota Kupang	1 Kali
3.	Dialog Interaktif Wawasan Kebangsaan di TVRI Lokal	Masyarakat Luas	Kota Kupang	2 kali
4.	Sosialisasi wawasan kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara	Tomas, Toga, Pengurus LSM, Ormas, Mahasiswa, Pelajar dan aparatur instansi terkait	Kabupaten Alor dan Malaka	2 Kali
5.	Forum komunikasi Revitalisasi Pancasila	Aparat Badan Kesbangpol Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus partai politik, Ormas, LSM, mahasiswa dan Pelajar	Kabupaten Ende	1 Kali
6.	Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat	tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten	Kabupaten Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat	3 Kali
7.	Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM	Anggota/Pengurus Forum FKBU, FPK Provinsi dan FPK, FKUB dan FKDM Kab/Kota	Kota Kupang	15 Kali

8.	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Politik :			
	1) Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019 2) Pemantauan Kegiatan Pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019	Kesbangpol se-NTT, KPU dan Bawaslu Kesbangpol, KPU dan Bawaslu	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	22 Kali 22 Kali

No.	Kegiatan	Sasaran Peningkatan Wawasan Politik Kebangsaan	Lokasi	Volume
9.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Masyarakat, Aparatur Badan Kesbangpol, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Pemilih Pemula (Pelajar tingkat SLTA), Instansi Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten	Kabupaten TTS, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat.	4 Kali
10.	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Anggota/Pengurus Forum FKBU, FPK Provinsi dan FPK, FKUB dan FKDM Kab/Kota	Kota Kupang	4 Kali
11.	perjalanan dinas Hasil penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	Hasil rekomendasi bantuan keuangan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi NTT	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai dan Sumba Barat Daya	9 Kali
12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22 Kab/Kota	22 Kali
13.	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi	Aparat Pemerintah Instansi terkait Badan Kesbangpol, Toga, Tomas, Badan/Dinas Sosial, Agama, Nakertrans, Pariwisata, Ormas/LMS terpilih, Pemilik Sanggar Kesenian, Ormas dan LSM	22 Kab/Kota	22 Kali

No.	Kegiatan	Sasaran Peningkatan Wawasan Politik Kebangsaan	Lokasi	Volume
14.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Pemprov. TNI, Polri, Kejati, Kemenhuk HAM, Pemda. Kab/Kota, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa/wi, Organisasi massa/ LSM, FKDM, Forkopimda Prov. Aparatur Kesbangpol	20 Kab/Kota	20 Kali
15.	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	Laporan Pemantauan dan Pendataan Orang Asing, NGO serta Lembaga Asing Tk. Provinsi dan Kab./Kota	Kab. Manggarai, Sikka, Ende, Labuan Bajo dan SBD	6 Kali
16.	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda, Tokoh Perempuan, Lurah dan Camat	Kabupaten Sumba Timur	1 Kali
JUMLAH				158

Tujuan pelaksanaan sejumlah kegiatan tersebut diatas adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dari makna yang terkandung dalam 4 (empat) pilar utama kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI bagi setiap warganegara, untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pencapaian sasaran strategis kedua yaitu terwujudnya kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan peningkatan wawasan dapat tercapai sesuai target, namun terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang ditemui sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah:

- 1) Peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pemahaman dan peningkatan pemahaman tentang ideologi dan wawasan

kebangsaan dan empat pilar kebangsaan sehingga tercipta komitmen dan kesadaran dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa masih belum optimal karena masih terbatasnya komitmen pemerintah daerah terutama tingkat Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi forum forum tersebut.

- 2) Belum terlaksananya amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah :

- 1) Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada pihak terkait tentang pentingnya mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pemahaman dan peningkatan pemahaman tentang ideologi dan wawasan kebangsaan dan empat pilar kebangsaan.
- 2) Pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dalam rangka mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran Strategis Ketiga :**Terwujudnya Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Ormas dan LSM yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT melaksanakan kegiatan pembinaan seperti pendataan Ormas dan LSM di 10 (sepuluh) Kab/Kota.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berlatar belakang pada pemikiran bahwa Ormas dan LSM merupakan Organisasi masyarakat yang berada di tengah masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah serta memahami betapa pentingnya peranan Kesbangpol dalam pembinaan Ormas dan LSM sebagai berikut :

Terlaksananya Pendataan Ormas dan LSM

Pengambilan data Ormas/LSM di 10 Kabupaten/Kota yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat dengan hasil adalah :

- Kabupaten Manggarai Barat : 19 Ormas/ LSM yang diusulkan terdapat 9 yang sudah mendapat nomor SKT, 10 masih dalam tahap verifikasi.
 - Kabupaten Alor : 11 Ormas/ LSM yang mengusulkan, 11 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Manggarai : 8 Ormas/LSM yang mengusulkan, 8 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kota Kupang : 23 Ormas/LSM yang mengusulkan, 23 belum mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Flores Timur : 56 Ormas/LSM yang mendaftar, 56 yang belum mendapat nomor SKT .
 - Kabupaten Kupang : 36 Ormas/LSM yang mendaftar, 36 belum mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten TTS : 35 Ormas/LSM yang mendaftar, 35 belum mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Belu : 80 Ormas/LSM yang mendaftar, 15 yang telah mendapat nomor SKT.
- Kabupaten TTU : 23 Ormas/LSM yang mendaftar, 20 yang telah mendapat nomor SKT.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD sebesar Rp.7.792.398.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp7.610.577.246,- atau sebesar 97.67 %.

Secara lebih terperinci Pagu dan realisasi anggaran dana APBD bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 dijabarkan sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 4.668.271.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.680.345.151,- atau sebesar 100.26 %.

2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung berbagai program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 3.124.127.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.930.232.095,- atau sebesar 93,79 %.

Adapun besarnya Belanja Lagsung terdiri atas :

- Belanja SKPD sebesar RP. 409.397.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 386.147.615,- atau sebesar 94.32 %.
- Urusan Wajib sebesar Rp. 3.124.127.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.930.232.095,- atau sebesar 93.12 %.

Anggaran bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Adapun jumlah anggaran per kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	100.000.000	95.380.600	95.38
2	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	361.608.000	322.700.330	89.24
3	Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM	339.800.000	338.664.700	99.67
4	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	392.703.000	377.231.750	96.06

5	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	64.821.000	61.145.200	94.33
---	--	------------	------------	-------

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	52.700.000	51.485.400	97.70
7	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	118.836.300	100.890.900	84.90
8	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	770.128.000	707.770.700	91.90
9	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	133.250.000,	115.551.000	86.72
10	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	46.300.000	45.489.500	98.25
	Jumlah	3.124.127.000	2.930.232.095	93.12

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyajian Laporan Kinerja ini didasarkan pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran realisasi pada Indikator Kinerja Utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi NTT dinilai cukup berhasil karena indikator mencapai 100 dari target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut, selain karena kinerja internal organisasi, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesbangpol Provinsi NTT.
- 2) Capaian Indikator kinerja utama Badan Kesbangpol Provinsi NTT yang masih belum optimal, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar kinerja organisasi kedepan menjadi lebih baik.
- 3) Dari sisi akuntabilitas keuangan capaian realisasi keuangan Badan Kesbangpol Provinsi NTT juga dikategorikan baik karena realisasi belanja sebesar 97.67x%, dengan rincian Realisasi Belanja Tidak langsung sebesar 100.26 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93.79 %.

B. SARAN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi NTT pada tahun 2019, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara umum kinerja utama organisasi dan kinerja kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT sudah pada kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2020;
- 2) Perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
- 3) Perlu sinergi kegiatan dengan mitra strategis, instansi terkait dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota agar pelaksanaan setiap kegiatan dapat terlaksana secara efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kupang, 23 Januari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



& JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196401101989032015